



BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ▶ Pusat Perancangan Undang-Undang
- ▶ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- ▶ Pusat Kajian Anggaran
- ▶ Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
- ▶ Pusat Penelitian

Gedung Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI, Lantai 7

☎ Telp. 021 - 5715730

✉ e-mail: bk@dpr.go.id

📍 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270





BADAN KEAHLIAN DPR RI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Selanjut dan BK DPR RI), BK DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Peraturan Presiden tersebut merupakan salah satu peraturan pelaksana atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Subbagian Badan Keahlian DPR RI



STRUKTUR ORGANISASI



Kadir Johnshon
Rajagukguk, S.H., S.Hum
Kepala Badan Keahlian



Dr. Indra Pahlevi, S.P., M.Si
Kepala Pusat Penelitian



Drs. Helmizar
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si
Kepala Pusat Kajian Anggaran



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Dr. Inosentius Samud, S.H., M.Hum
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Tugas dan Fungsi Badan Keahlian DPR RI

- Pusat Perancangan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada perancangan undang-undang.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan DPR RI untuk pemidangan Mahkamah Konstitusi.

- Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis anggaran.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara.
- Pusat Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- PUSAT PERENCANAAN UNDANG-UNDANG
- PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
- PUSAT KAJIAN ANGGARAN
- PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
- PUSAT PENELITIAN
- BAGIAN TATA USAHA BADAN KEAHLIAH
- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

VISI

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

MISI

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan,
- Memperkuat manajemen pengetahuan,
- Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

PRODUK

- ANALISIS APBN
- REFERENSI APBN
- ANALISIS RINGKAS CEPAT (ARIC)
- BULETIN APBN
- BUKU
- JURNAL BUDGET
- INFOGRAFI
- VIDEOGRAFI
- DATA INDIKATOR
- KNOWLEDGE MANAGEMENT



STRUKTUR ORGANISASI

Dr. ASEP AHMAD SAEFULOH, S.E., M.Si.

Kepala Pusat Kajian Anggaran

MAMED SOBARI

Pengelola Data

HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.

Penyusun Bahan Kebijakan

MUSBIYATUN

Pengelola Data

SITI RAHMAWATI, S.E.

Pengelola Data

BIDANG PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

DWI RESTI PRATIWI, S.T., MPM.

*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

JESLY YURIATY PANJAITAN, S.E., M.M.

*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

MUJIBURRAHMAN

Analisis APBN Non Fungsional

HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc

Analisis APBN Non Fungsional

DEASY RAMIAYU, S.E

Analisis APBN Non Fungsional

MATIUS WINARNO, SE., MAB

Analisis APBN Non Fungsional

IRANISA, SE., M.Acc

Analisis APBN Non Fungsional

BIDANG PERENCANAAN DAN ASUMSI EKONOMI MAKRO

RASTRI PARAMITA, S.E., M.M.

*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

RATNA CHRISTIANINGRUM, S.Si., M.Si.

*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

DAHRI, S.Si., M.Sc

*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

MUTIARA SHINTA ANDINI, SE

Analisis APBN Non Fungsional

FADILA PUTI LENGGO GENI, SE., MM

Analisis APBN Non Fungsional

NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE., M.Sc

Analisis APBN Non Fungsional

LARAS LINTANG ASMORO, SE., MM

Analisis APBN Non Fungsional

RIZA ADITYA SYAFRI, S.Ak

Analisis APBN Non Fungsional



BIDANG BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MARTHA CAROLINA, SE, Ak., M. Ak.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

ROBBY ALEXANDER SIRAIT, S.E., M.E.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

ADHI PRASETYO SATHIYO WIBOWO, S.M.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Analisis APBN Non Fungsional

RICKA WARDIANINGSIH, SE
Analisis APBN Non Fungsional

FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE
Analisis APBN Non Fungsional

OLANIE VABIOLA BANGUN, SIP, MM
Analisis APBN Non Fungsional

ANISA FITRIA WULANINGTYAS, SE
Analisis APBN Non Fungsional

BIDANG BELANJA TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA

SLAMET WIDODO, S.E., M.E.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Muda*

ADE NURUL AIDA, S.E.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

MARIHOT NASUTION, S.E., M.Si.
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Pertama*

RENDY ALVARO, S.Sos
*Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Ahli Muda*

ERVITA LULUK ZAHARA, SE
Analisis APBN Non Fungsional

FIRLY NUR AGUSTIANI, SE
Analisis APBN Non Fungsional

FEBRINA ELIA NABABAN, S.Pd, M.Sc
Analisis APBN Non Fungsional

EMILLIA OCTAVIA, ST., M.Ak
Analisis APBN Non Fungsional

DYAH MAYSARAH, S.Hut
Analisis APBN Non Fungsional



SISTEM MANAJEMEN MUTU

Pedoman Mutu

Pedoman Mutu berisi kebijakan dan tata cara penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI yang sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015. Pedoman Mutu ini merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai acuan bagi dokumen-dokumen yang berada di bawahnya. Pedoman Mutu ini selaras dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang pada dokumen-dokumen rujukan yang menetapkan Visi-Misi serta rencana-rencana jangka panjang organisasi.

Laporan Kinerja

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan pencapaian alas perbandingan antara perencanaan dengan realisasi. Perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Kemudian berdasarkan renstra tersebut dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) 2016. Dalam Renstra termuat indikator keberhasilan sebagai us targetnya selama periode 2016-2019. Selanjutnya target kinerja output tersebut dijabarkan setiap tahunnya melalui target kinerja output dalam Renja 2016. Target kinerja output yang termuat dalam Renstra dan Renja merupakan target kinerja organisasi Pusat Kajian anggaran, yang kemudian diformulasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diuraikan dalam Pedoman Penjabaran Kerja Pegawai (PPKP).



KELOMPOK KERJA PARLIMENTER

Anggota Komisi



Dr. Indra Rahena, S.P., M.Si



KELOMPOK KERJA

Kepala Komisi
Pengawasan
Keuangan



Drs. Ahmad
Budiningsih, M.Pd

Penjabat Kepala
Subsistem Hukum

Kepala Komisi
Pengawasan
Sosial



Puteri Hikmahwati,
S.H., M.H.

Penjabat Kepala

Kepala Komisi
Pengawasan
Pendidikan



Drs. Humsheer
Wignyo, M.Si

Penjabat Kepala
Subsistem Hukum

Kepala Komisi
Pengawasan
Pendidikan dan Kebudayaan



Marissa Hartha,
S.E., M.E.

Penjabat Kepala
Subsistem Hukum

Kepala Komisi
Pengawasan
Kesehatan



Siti Susilana, S.Sos,
M.Si

Penjabat Kepala
Subsistem Hukum



Pusat Penelitian Kajian Nasional DPR RI
Jalan Pemuda 2, Lantai 2, 5, Hotel Gema
Sukorejo, Jember, Jawa Timur 60179
Telp. 031-8225408 / 8225245 Fax. 031-82252



BIDANG PENELITIAN

POLITIK DALAM NEGERI

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis tentang:

- Kelembagaan negara: eksekutif, legislatif, dan lain-lain.
- Kelembagaan politik: partai politik, sistem pemilu, organisasi masyarakat, LSM, dan lain-lain.
- Kedaerahan: pemerintah daerah, DPRD, hubungan pusat-daerah.
- Komunikasi massa, pers, media cetak dan elektronik, dan lain-lain.
- Politik lokal dan otonomi daerah.
- Birokrasi dan aparatur negara.
- Pertahanan.

HUKUM

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis tentang:

- Hukum tata negara/konstitusi.
- Hukum dan pemerintahan.
- Peraturan perundang-undangan.
- Penegakan hukum.
- Hukum pidana.
- Hukum internasional.
- Hukum ekonomi.
- Hukum perdata.
- Hukum agraria.
- Hak Asasi Manusia.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Politik luar negeri Indonesia.
- Perkembangan kawasan.
- Organisasi internasional.
- Politik dan keamanan internasional.
- Ekonomi internasional.
- Lingkungan hidup global.
- Sosial dan budaya global.
- Kerja sama bilateral dan multilateral.



KESAJAHTERAAN SOSIAL

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis tentang:

- Pembangunan SDM,
- Pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan agama,
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Kepemudaan dan olahraga,
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Lingkungan hidup,
- Kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, pembangunan pedesaan, dan perkembangan perkotaan;
- Kesejahteraan masyarakat: kesehatan, jaminan sosial,
- masyarakat terasing, konflik, dan diskriminasi, serta masalah-masalah sosial lain.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- Keuangan dan perbankan,
- Manajemen dan pembangunan,
- Investasi dan industri,
- Kebijakan publik.



PELAKSANAAN KEGIATAN

- Meneliti berbagai topik yang relevan dengan perkembangan Indonesia untuk dijadikan usulan kepada Alat Kelengkapan Dewan dalam membahas berbagai kebijakan dengan pemerintah.
- Menyusun berbagai kajian atas permintaan Pimpinan-pimpinan Dewan, Alat Kelengkapan Dewan, dan Komisi.
- Menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian secara berkala (tiga bulan sekali) dan Jurnal Politika, Jurnal Negara Hukum, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta Jurnal Aspirasi yang juga diterbitkan secara berkala (masing-masing enam bulan sekali) sebagai sarana publikasi hasil penelitian maupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk diberikan kepada Anggota Dewan sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Menerbitkan buku-buku hasil penelitian atau kajian terhadap isu-isu yang berkembang untuk diberikan kepada Anggota DPR RI sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Menyelenggarakan seminar/workshop/diskusi tentang berbagai isu yang sedang berkembang untuk bahan masukan kepada DPR RI.



PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI

VISI

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas"

MISI

- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan.
- Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

PRODUK

- NASKAH AKADEMIK
- RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- JURNAL PRODIGY RI
- PROSIDING
- PEDOMAN KERJA
- BUKU





BIDANG POLITIK HUKUM & HAM

Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Madya

Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.
Eka Marnana Wulaman, S.H., M.H.
Yeni Mandayani, S.H., M.H.
Lully Fitriani, S.H., M.H.
Mardianetoni, S.Ag., LL.M.

Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Muda

Radew Priharta Budipratetya Ekastaya
Prabdhondarsopo W. Yudakusuma, S.H., M.Kn.
Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.
Riyani Shelayati, S.H., M.Kn.

Calon Perancang Peraturan

Perundang-Undangan

Achmadudin Rajab, S.H., M.H.
Agus Priyomo, S.H.
Apriyati Dewi Azis, S.H.
Christina Devi Natalia, S.H.
Mara Pimyla Stephanie Florencia Wicomo, S.H.
Stephanie Rebecca Magdalena P. Purba, S.H., LL.M.
Tommy Cahya Timalda, S.H.
Novat Ali Muchtar, S.H.
Shirya Andini Sidi, S.H.

BIDANG EKONOMI KEUANGAN INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Madya

Wawan Sri Rahyana, S.H., M.H.
Ahmad Aulawi, S.H., M.H.
Adil Usman, S.H., M.H.
Kholidatussadiq, S.Ag., LL.M.
Zaqni Rahman, S.H., M.H.

Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Muda

Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.

Calon Perancang Peraturan

Perundang-Undangan

Sabriyanti, S.H., M.H.
Febri Liany, S.H., M.H.
K. Zulfair Andriansyah, S.H.
Lucky Syarif Aryawan, S.H.
M. Nurfaiz, S.H.
Melina Fajarwati, S.H.
Muhammad Yusuf, S.H.
Oliver Perazita, S.H.
Noor Retha Widayati, S.H.
Dianita Andriani, S.H.
Aryani Sindungsum, S.H.

SIMAS PUU

SIMAS PUU merupakan sarana partisipasi masyarakat secara online melalui website PUU dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang guna mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien, dan efektif melalui beberapa instrumen:

- Penyusunan database *stakeholder* yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.
- Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU di Badan Keahlian DPR RI.
- Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.
- Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.
- Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.

FOCUS GROUP DISCUSSION PUU



SEMINAR NASIONAL OPTIMALISASI SIMAS PUU



SEMINAR KEPOLISIAN BELANDA



Parliament and Constitution for the Future

RESEARCH TEAM 2020

2019-2020
The research team consists of 10 members, 5 from the Indonesian Parliament and 5 from the Indonesian Constitution Commission.



STRUKTUR ORGANISASI



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang



Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha



Mohamad Yunus, S.H.
Penyusun Bahan Kebijakan



Ani Maryani, S.E.
Penyusun Bahan Kebijakan



Agus Abdurahman
Pengadministrasi Umum



Ade Hardha Gunawan
Pengelola Data



Syarifudin
Pengelola Data

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Madya**
Woro Wulaningrum, S.H., M.H.
Arrista Trimaya, S.H., M.H.
Arisa Praharini, S.H., M.H.
Aan Andrianih, S.H., M.H.
Nita Arlyulinda, S.H., M.H.
Bagus Prasetyo, S.H., M.H.
Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
Chairul Umam, S.H., M.H.

**Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Muda**
Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.
Kuntari, S.H.

**Calon Perancang Peraturan
Perundang-Undangan**
Ihsan Badruni Nasution, S.SY
Sindy Amelia, S.H.
Yanuar Putra Erwin, S.H.
Yuwinda Sari Pujianti, S.H.
Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
Nova Manda Sari, S.H., M.H.
Asma' Hanifah, S.H.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI

SEJARAH

● Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan unit kerja di bawah Biro Hukum, Deputi Bidang Perundang-Undangan.

● Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Keahlian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat, 1 Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 2 Tahun 2016,

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu pusat di lingkungan Badan Keahlian, dipimpin seorang Eselon II yang dilantik pada November 2015. Pada bulan yang sama, dilantik pula Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. SDM Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada TMT Agustus 2018 terdiri atas Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan staf/pelaksana serta pejabat fungsional.

- Terhitung mulai Januari 2016 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mendapat tambahan staf/pelaksana. Dan pada Tahun Anggaran 2016 melalui seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memperoleh SDM Analisis Hukum sejumlah 17 orang TMT 1 November 2016. Pada Tahun ini ditetapkan koordinator bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang dan koordinator bidang penanganan perkara pengujian undang-undang.
- TMT 1 Januari 2017, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memperoleh 8 formasi CPNS analisis hukum. Perjanjian kerja 17 orang PPNPN Analisis Hukum diperpanjang untuk satu tahun pada Tahun Anggaran 2017. Pada tahun ini pula, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mendapat lagi tambahan staf/pelaksana sehingga jumlah PNS yang ditempatkan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebanyak 10 orang. Berdasarkan Keputusan Sekjen DPR RI pada tahun 2017 ditetapkan koordinator bidang keahlian pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



02018 - Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (PPI) - Lembaga Badan Penyelenggara (LBP)
 Gedung Gedung dan Gedung Kabinet LBP
 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Indonesia 10110
 Telp: 021-57154011/1111-5711555, Fax: 021-5711555



VISI

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

MISI

- Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel.
- Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRODUK

Adapun produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (PPPUU) diantaranya adalah, Keterangan DPR RI mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945; Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU; Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK; Info *Judicial Review* Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan; Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima; Buku; Infografis; Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK; SIPENGRAJIN UU; SIPANLAK UU; dan SIMAS PANLAKUU

STRUKTUR ORGANISASI

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Dahliya Baihnan, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Martin Yohannes (Pengelola Data)
Hariyanto, S.H. (Penyusun Bahan Kebijakan)
Samudi (Pengadministrasi Umum)
Supian, S.E. (Pengadministrasi Umum)
Nadia Septyana (Pengelola Data)
Atis Jaelani (Pengadministrasi Umum)



ANALIS HUKUM [ANALIS PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG]

Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
 Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
 Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
 Rosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
 Nur Azizah, S.H., M.H.
 Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
 Leza Azhari, S.H., LL.M.
 Ra Chandra Puspita, SH., M.H.
 Jordan Muhammad, S.H.
 Wisuharto Clinton, S.H.
 Ninanti Mega Dewanti, S.H.
 R. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn

Mega Irianna Ratu, S.H., MBA.
 Aska Cardima, S.H.
 Donny Satya Widjanarko, S.H.
 Deny Giovanno
 Endang Sulistyorin, S.H., M.Kn.
 Anisa Rahmasari, S.H.
 Yodia Surya Nugraha, S.H.
 Juan Fery Situmorang, S.H.
 Antonius Samtumip, S.H.
 Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn
 Ratna Dewi Tisnasari, S.H.
 Krikammanis Noviarty Q, S.H.

ANALISIS KEBIJAKAN

Soedji Poerwanti, S.H., M.H.
 Analisis Kebijakan Pertama



PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI

VISI

Menjadi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang profesional, andal, dan akuntabel

MISI

- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian terhadap hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan.
- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian hasil pemeriksaan kinerja.
- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian lhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).
- Memberikan dukungan keahlian berupa kajian lhtisar Hasil Pemeriksaan 5 (lima) Tahunan.
- Memberikan dukungan keahlian berupa hasil kajian evaluasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan publik.

SEJARAH

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Puskaji AKN) merupakan lembaga baru sebagai pengembangan dari unit yaitu Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD di bawah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Keberadaan unit tersebut berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.400/Sekjen/2005, didukung oleh analis yang memiliki tugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam bidang pengawasan dengan melakukan analisis, ringkasan dan telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan terhadap pengawasan serta pertimbangan DPD RI.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bahwa terdapat alat kelengkapan DPR baru yang bersifat tetap, yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang memiliki tugas, yaitu melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; menyampaikan hasil penelaahannya kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta perwajian dan kualitas laporan.



Gedung Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
 Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI
 Gedung Sekretariat Jenderal BPK RI lantai 4,
 J. Sudi. Kantor BPK-RI, Semarang, Jawa Tengah 50132
 Telp 021/5715 195 / 731. Fax 021/5715 734





Namun sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, BAKN sebagai alat kelengkapan dewan ditiadakan, tetapi secara fungsi dikembalikan kepada komisi-komisi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, khususnya di bidang keahlian dibentuk Badan Keahlian DPR yang terdiri dari 5 (lima) pusat, diantaranya adalah Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Puskaji AKN).

Puskaji AKN bertugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan dukungan keahlian tersebut dilakukan oleh fungsional APBN, yaitu berupa analisis/kajian, referensi & telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta analisis terhadap hasil pengawasan DPD RI atas penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI dan pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

PRODUK

- RINGKASAN DAN TELAHAHAN
- KAJIAN AKUNTABILITAS
- ANALISIS RINGKAS CEPAT
- LAPORAN KUNJUNGAN DAERAH
- BUKU
- HASIL DISKUSI PAKAR
- INFOGRAFIS

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (AKN)

Ageng Wardoyo, S.H.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Muhamad Aaqil Imama, S. I. Kom

Penyusun Bahan Kebijakan

Drs. Helmizar

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



BIDANG RINBANG

FEBRI KUNTARTO

Analisis AKN

NUR MUH RIDWAN

Analisis AKN

SYANDI NEGARA

Analisis AKN

HAFIZ DWI PUTRA

Analisis AKN

BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Ahli Muda

MEDHIA HARTANTI

Analisis AKN

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN (POLKAM)

SINDI MEIDA RIZKIANA

Analisis AKN

MOCHAMMAD RIZAL FIRMANSYAH

Analisis AKN

TEUKU SURYA DARMA

Analisis AKN

BIDANG REKKU

ISUNDARI ANINDITA

PARAMESHTI

Analisis AKN

MARYANI

Analisis AKN

SITI NURHIDAYAH

Analisis AKN